

KELOMPOK – KELOMPOK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Makalah

**Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah
FPIPS UPI Bandung**

Oleh :

Drs. Syarif Moeis

NIP : 131 811 175



**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG 2009**

Kelompok – Kelompok Dalam Masyarakat Multikultural

1. Pendahuluan

Menurut besarnya, sekurangnya masyarakat itu terbagi menjadi dua bentuk; pertama yaitu masyarakat yang relatif kecil yaitu satu bentuk masyarakat dimana anggota-anggotanya terikat pada satu acuan nilai yang mengikat mereka pada kesamaan identitas, sistem dan struktur sosialnya masih sederhana dan masih mudah untuk dianalisa, dan masih memungkinkan bagian atau kelompok-kelompok dalam masyarakat itu melakukan hubungan langsung secara intensif, contoh bentuk masyarakat ini seperti masyarakat *Anak Dalam* di Jambi atau bahkan masyarakat Jambi, masyarakat *Sakai* di Riau, atau bahkan masyarakat Riau, masyarakat *Baduy* di Jawa Barat atau bahkan masyarakat *Sunda* Jawa Barat, dan banyak lagi ; dan kedua, yaitu masyarakat yang relatif besar yaitu suatu bentuk masyarakat yang anggota-anggotanya walaupun terkait pada satu acuan nilai dan identitas namun nilai dan identitas itu ada dalam wujud yang sangat terbatas, sistem dan struktur sosialnya sudah sedemikian kompleks sehingga agak sukar untuk dianalisa, dan karena sedemikian besarnya masyarakat menyebabkan hubungan antara anggota, kelompok, dan bagian-bagian dalam masyarakat itu kurang memungkinkan terjadi secara langsung dan intensif, keadaan ini terkait juga dengan hambatan-hambatan geografis, contoh bentuk masyarakat ini seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus kebudayaan lokal yang terbentang dari Sabang sampai Merauke; walaupun ada dalam satu ciri masyarakat namun agaknya sulit bagi anggota-anggotanya untuk senantiasa berhubungan secara langsung dan intensif satu sama lain.

Meskipun kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia dalam arti luas seperti di atas, namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang, biasanya yang terbayang hanyalah sekelompok orang-orang Indonesia di sekitar kita saja, di suatu lokasi tertentu. Seorang ahli sosiologi Indonesia, M. M. Djojodigono (1958), membedakan antara konsep ‘masyarakat dalam arti luas’ dan ‘*masyarakat dalam arti sempit*’; dalam konsep itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam arti luas, dan masyarakat disekeliling kita apakah itu desa atau kota tertentu, maupun masyarakat warga kelompok kekerabatan seperti *marga*, *dadia*, atau *suku bangsa* adalah masyarakat dalam arti sempit.

Dalam lingkup yang lebih kecil, keberadaan masyarakat multikultural ini masih mungkin terjadi seperti yang ada pada kota-kota metropolitan. Hampir seluruh potensi budaya lokal terkonsentrasikan di daerah metropolitan ini, namun keberadaan mereka masing-masing agak berbeda dengan tempat asalnya; hampir dapat dipastikan bahwa keberadaan mereka adalah dengan tujuan ekonomi, dan untuk sampai pada harapannya itu mereka sepertinya siap untuk menanggalkan segala atribut budaya sebagai bagian penting dari identitasnya; walaupun sebenarnya mereka itu saling bersaing, tetapi kondisinya kurang memungkinkan untuk selalu begitu, secara tidak langsung mereka dituntut untuk saling beradaptasi dan berkerja sama agar tujuannya dapat tercapai. Peleburan budaya lokal pada satu bentuk budaya yang dirasakan dapat mengakomodir seluruh aspirasi warga budaya yang bersangkutan.

Contoh kasus kehidupan di atas seperti yang terjadi di DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta, satu sisi sebagai prototipe kota metropolitan dan satu sisi lagi sebagai sebagai Ibu Kota Republik Indonesia ; hampir seluruh potensi budaya lokal yang ada di Indonesia terkonsentrasi di Jakarta, sehingga dengan sedemikian banyak dan besarnya potensi budaya lokal ini, sampai-sampai masyarakat *Betawi* sebagai penduduk setempat merasa terancam keberadaannya; Kota Jakarta, sebagai gerbang keluar masuk berbagai macam penduduk Indonesia, bahkan dunia, dunia tidak mempunyai alternatif lain selain berusaha mengembangkan diri sebagai kota pusat pemerintahan, kota kenegaraan, kota perdagangan, dan bentuk-bentuk yang lain, yang jelas tidak diproyeksikan sebagai tempat bermukim. Sedemikian kuat dorongan untuk pengembangan kota ini, sehingga suka atau tidak suka masyarakat *Betawi* mengikuti arus perubahan ini, mereka mulai mencari daerah pemukiman di sekitar kota Jakarta yang dirasakan kurang kondusif lagi untuk daerah pemukiman. Keadaan serupa terjadi pula diberbagai daerah metropolitan lain dibelahan dunia ini.

Secara logis proses peleburan itu bisa terjadi dengan adanya saling adaptasi dari berbagai budaya yang berbeda kedalam satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya belum tentu demikian. Kalau kita kembali pada dasar-dasar perubahan kebudayaan manusia, sepertinya kita sampai pada pengertian bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu tidak puas dengan apa yang telah diperolehnya, juga memiliki dorongan untuk mengamankan diri. Memang benar, dalam suatu kehidupan bersama untuk mencapai suatu harapan tertentu masing-masing pihak berusaha untuk saling beradaptasi dan bekerja sama, namun di balik itu sepertinya kecenderungan sifat manusia dalam konteks perubahan di atas tidak boleh diabaikan, masing-masing pihak pada

dasarnya saling menyusun kekuatan, bila satu pihak merasa lemah maka dia akan sangat adaptif dan kooperatif, namun bila satu pihak merasa mempunyai kekuatan lebih maka kecenderungan untuk mendominasi pihak lainnya mulai timbul.

Pertimbangan kekuatan inilah yang menjadi bibit timbulnya persinggungan-persinggungan dalam masyarakat multikultural; masing-masing merasa mempunyai pengaruh atau kekuatan lebih dari lain yang sehingga timbul kecenderungan untuk saling menguasai; pertimbangan ini bisa berdasar pada bidang ekonomi, politik, mayoritas, atau juga wewenang yang diperoleh satu kelompok.

Satu bentuk keberadaan lain dari masyarakat multikultural dalam dimensi yang lebih luas yaitu dalam bentuk bangsa, seperti halnya keanekaragaman kebudayaan itu lebih memungkinkan keberadaannya dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas; bangsa Indonesia pantas disebut sebagai bangsa yang besar karena memang memiliki potensi untuk menjadi besar, tidak saja ditunjang oleh kewilayahan membentang luas, jumlah penduduk yang besar, namun juga sarat dengan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain, mungkin hanya perbedaan ras saja yang tidak terlalu menyolok dari keanekaragaman di atas. Berbeda dengan kehidupan pada bentuk masyarakat yang terbatas seperti pada masyarakat metropolitan, maka masing-masing masyarakat dan kebudayaan pada masyarakat yang luas ini sangat mempunyai kepribadian yang kuat, identitas mereka sangat jelas untuk mempertahankan ciri kebudayaannya.

Kehidupan bersama dengan muatan keragaman yang kompleks tentunya mengandung konsekuensi; untuk kondisi kehidupan yang kurang beragam saja selalu timbul masalah-masalah, apalagi kondisi kehidupannya sangat beragam, tentunya masalah-masalah dalam kehidupan bersama akan lebih kompleks lagi. Kompleksitas keragaman yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentunya sarat dengan permasalahan, tugas dari *sosiologi* adalah untuk meneliti, mencari, menggambarkan, dan menganalisa akar permasalahan tersebut yaitu tentang mengapa, dari mana, dan bagaimana masalah itu bisa timbul; setelah permasalahan dapat dipetakan secara jelas, baru dapat diambil langkah-langkah untuk mengembalikan pada bentuk keseimbangan semula.

Keadaan inilah yang menjadi tantangan kita, sebagai warga masyarakat Indonesia sedini mungkin kita harus menyadari arti suatu kehidupan bersama; kita tidak bisa hidup sendiri, kita senantiasa memerlukan orang lain untuk saling bekerja sama - dengan siapapun kita hidup. Terkadang orang lupa atau sengaja melupakan tentang keberadaan dirinya bila

dihubungkan dengan orang lain, mereka hanya ingat apa yang seharusnya orang lain berikan pada kita, bukan apa yang seharusnya kita berikan pada orang lain; atau dengan kata lain orang akan selalu ingat tentang fasilitas dan hak dan cenderung mengabaikan apa yang menjadi tugas atau kewajibannya.

2. Masyarakat Multikultural Studi tentang Masyarakat Indonesia

2.1. Kesejarahan : Diversitas Sukubangsa dan Kesatuan Nasional

Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke-4 M. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan –kebudayaan sukubangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kepulauan nusantara menjadi satu bagian yang integral dalam perdagangan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan ke Tiongkok, dan ketika pada abad ke-4 dan ke-5 rempah-rempah dari kepulauan Indonesia, seperti merica, cengkeh dan pala, menjadi komoditi penting dalam ekonomi dunia kuno, keterlibatan dalam perdagangan rempa-rempah meningkatkan mobilitas antarpulau di kalangan penduduk nusantara. Mereka yang tinggal di daerah-daerah strategis dalam jaringan perdagangan antarapulau, seperti Sulawesi Selatan, pantai timur dan barat Pulau Jawa, Sumatra Selatan, Malaka dan Aceh, kemudian tampaknya menjadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan dagang kecil. Tergantung keadaan, mereka mungkin telah mengalami persaingan keras namun merupakan negara-negara tetangga yang bekerja sama pula. Negara-negara ini terpusat pada kota-kota pelabuhan, dan pada umumnya tidak memiliki daerah pedalaman yang luas maupun penduduk yang padat. Namun negara-negara tersebut mempunyai armada dagang yang besar, yang terdiri dari perahu-perahu bercadik dan dilengkapi dengan layar lebar.

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan sekurangnya ada tiga keadaan dalam sejarah nasional di atas yang menggambarkan kesatuan antara negara-negara kecil tersebut yang di masa lalu tidak terlibat konflik antar sukubangsa, dan menyebabkan bangsa Indonesia dan para pemimpin mereka selalu mengacunya dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi sukubangsa dan kesatuan nasional masa kini.

1. Dua buah kerajaan Indonesia telah mempersatukan secara sosial ekonomi (mungkin juga politik) negara-negara kecil yang sebelumnya saling bersdaing, ialah

kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 m dan 8 M, yang pusatnya di Sumatra Selatan, dan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 M yang berpusat di Jawa Timur.

2. Seluruh rakyat Indonesia telah mengalami dominasi kolonial kerajaan Belanda dari negara Eropa selama tiga setengah abad, suatu kenyataan yang memberikan mereka rasa penderitaan yang sama.
3. Selama pergerakan nasional untuk kemerdekaan antara tahun 1920-an sampai dengan 1930-an, pemuda Indonesia telah menolak menonjolkan isu kesukubangsaan; dan pada tahun 1928 memilih bahasa dari satu sukubangsa kecil, yaitu bahasa *Melayu*, dan bukan bahasa-bahasa dari sukubangsa Jawa yang penduduknya paling besar, sedangkan pemimpin-pemimpin intelektual sudah sejak tahun 1930-an merintis pendidikan nasional (gerakan Taman Siswa dan gerakan Muhammadiyah).

2.2. Masyarakat, Sukubangsa, dan Bangsa

2.2.1. Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan sosial besar dapat ditanggapi sebagai suatu tatanan aturan yang berpola yang mengatur kehidupan penduduk di wilayah negara Republik Indonesia. Tatanan ini terdiri dari sejumlah nilai yang diberi makna budaya dan pengesahan budaya sebagai pedoman bersama dalam tindakan sosial para warganya. Di samping nilai-nilai bersama tersebut masyarakat juga mewujudkan aturan-aturan yang lebih khusus yang mengatur pembagian hak dan kewajiban para warga pada pengelompokan-pengelompokan warga yang lebih khusus, seperti aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota-anggota keluarga-keluarga tertentu, perguruan-perguruan tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, dan banyak pengelompokan-pengelompokan lain.

Masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem sosial terkait pada kebudayaan Indonesia, yang sering juga dinamakan kebudayaan nasional. Kebudayaan yang sifatnya menyeluruh inipun dapat ditanggapi sebagai suatu sistem, suatu sistem budaya, yang mempunyai makna, atau diharapkan mempunyai makna, bagi sekalian warga masyarakat Indonesia. Sistem budaya ini terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu, seperti kepercayaan yang berkenaan dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa; adanya hidup di dunia dan di akhirat, surga dan

neraka; adanya pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat; pengetahuan kognitif tertentu, seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi dan yang dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli dalam ilmu pengetahuan; nilai-nilai dan aturan-aturan yang menyatakan pola perilaku mana yang dianggap baik dan yang mana yang dianggap tidak baik; serta berbagai hasil ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan penggunaan simbol-simbol yang biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan pelaku-pelaku yang bersangkutan sebagaimana banyak terdapat dalam karya-karya seni dan sastra.

Sebagai warga masyarakat, masing-masing pelaku yang berdiam di wilayah negara Republik Indonesia diharapkan berpedoman pada kebudayaan nasional; meskipun, sebagaimana nanti mudah-mudahan terlihat secara lebih jelas, tidak dalam setiap keadaan pelaku-pelaku yang bersangkutan bertindak dengan berpedoman pada kebudayaan nasional.

Tindakan-tindakan sosial masing-masing pelaku, atau tindakan yang diwujudkan oleh seorang pelaku terhadap orang lain, banyak tergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, bagaimana pelaku melihat keadaan yang dihadapi, motivasi dan tenaga yang menggerakkan pelaku untuk berbuat, serta nilai dan aturan yang pelaku jadikan pedoman dalam bertindak. Tindakan antar warga dalam masyarakat mengakibatkan pembentukan berbagai sistem-sub dari masyarakat yang juga disebut sektor kehidupan bermasyarakat, seperti keluarga, ekonomi (terutama sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa), kesehatan, ibadah agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, serta sastra dan seni. Masing-masing sistem-sub inipun diatur oleh sistem budaya tertentu, yang juga dikenal sebagai suatu pranata masyarakat yang bersangkutan, yang mengakibatkan para pelakunya cenderung memperlihatkan sifat-sifat kepribadian tertentu dalam menjalankan peranan dalam sistem-sub yang bersangkutan, seperti kepribadian birokrasi, kepribadian pengusawan, kepribadian petani dan sebagainya.

Sesungguhnya masih banyak orang pribumi di Indonesia yang dalam kenyataannya belum berperan dalam masyarakat Indonesia di luar kolektiva sosial kewilayahan dimana mereka hidup, yaitu masyarakat setempat masing-masing. Di wilayah negara Indonesia tidak saja hanya terdapat masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat-masyarakat yang lebih terbatas, seperti masyarakat daerah dan masyarakat setempat (*komunitas*). Masing-masing masyarakat inipun, seperti masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Bugis, masyarakat Minahasa, masyarakat Makasar, masyarakat Bali, masyarakat Tapanuli, dapat

ditanggapi sebagai sistem sosial tersendiri yang diatur oleh sistem budaya tersendiri dengan warga-warga masyarakat yang memiliki kepribadian yang sedikit banyaknya terbentuk oleh kebudayaan dan struktur sosial masyarakat dimana mereka dibesarkan.

Bilamana seseorang semata-mata bertindak dengan mengacu pada kebudayaan masyarakat daerahnya saja, ia tidak dapat dianggap telah ikut berperan sebagai pelaku dalam masyarakat Indonesia yang lebih besar. Dilihat secara analitik, banyak orang pribumi di wilayah Indonesia masih hanya berperan sebagai anggota masyarakat daerah asalnya saja. Penggambaran demikian tidak berarti bahwa seseorang dituntut untuk dalam setiap keadaan bertindak sebagai warga masyarakat Indonesia. Seseorang dapat menganggap diri anggota masyarakat daerah tertentu dan berperan sesuai dengan keanggotaannya, seperti dalam kehidupan keluarga, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti di kantor, di perguruan, di perusahaan, atau di terminal bis, juga berperan sebagai anggota masyarakat Indonesia dengan mengacu pada kebudayaan Indonesia. Masyarakat melangsungkan kehidupannya dengan diatur oleh negara ataupun tanpa diatur oleh negara. Di Indonesia, masyarakat Indonesia yang menyeluruh semakin banyak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, dan berbagai umat agama.

2.2.2. Bangsa Indonesia

Persekutuan hidup yang dikenal sebagai bangsa (*nation*) adalah suatu ikatan solidaritas dan loyalitas antar sesama anggota yang terdiri atas sejumlah besar pelaku yang menganggap diri dan dianggap mewakili suatu persekutuan hidup tertentu, apapun ras, sukubangsa, agama, ideologi politik, dan kewarganegaraannya. Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang dianggap orang Indonesia memang menganggap diri orang Indonesia dan sebaliknya; tidak semua orang yang menganggap diri orang Indonesia dianggap orang Indonesia oleh semua orang Indonesia lain. Keadaan demikianlah yang mengakibatkan adanya masalah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Harsya Bachtiar (1996), seorang ahli Sosiologi Indonesia, mengatakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh para anggotanya melalui dua sumber utama, yaitu (1) suku-suku bangsa pribumi di wilayah Republik Indonesia, dan (2) golongan-golongan penduduk yang berasal dari luar kepulauan Indonesia, murni maupun peranakan, yang kemudian menetap di

wilayah Republik Indonesia. Proses penyaringan anggota pada dasarnya melalui dua cara, yaitu (1) *pemasukan (inclusion)*, dan (2) *pengerahan tenaga* (mobilisasi).

Pemasukan terjadi bila mana orang-orang yang tadinya berada di luar persekutuan yang dikenal sebagai bangsa Indonesia dijadikan sebagai anggota bangsa ini. Banyak diantara orang keturunan Arab, Cina, Belanda, Portugis, atau India menjadi bagian dari bangsa Indonesia melalui proses pemasukan. Penduduk pribumi yang berasal di daerah Timor Timur yang kemudian pindah bermukim di wilayah Republik Indonesia setelah memisahkan diri dari negara kesatuan, ada juga yang memilih menjadi bagian dari bangsa Indonesia melalui proses pemasukan ini

Pada berbagai masyarakat daerah yang semula merupakan wilayah suatu bangsa yang kini disebut sukubangsa, terutama masyarakat-masyarakat daerah yang besar, golongan terpelajar yang merupakan bagian dari golongan atas di masyarakat-masyarakat yang bersangkutan cenderung lebih dahulu menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bahkan, diantara mereka yang menganggap diri anggota bangsa Indonesia sejak berada di bangku sekolah menengah pada akhir dekade kedua abad keduapuluh. Pada masyarakat-masyarakat demikian terjadi penyaringan anggota baru bangsa Indonesia melalui proses *pengerahan tenaga* di antara golongan-golongan bawahan yang semula tidak menganggap diri bagian dari bangsa Indonesia dalam masyarakat daerah demikian sehingga pelaku-pelaku dari golongan-golongan inipun menganggap diri orang Indonesia. Dalam waktu yang boleh dikatakan singkat bangsa Indonesia memperoleh semacam ingatan bersama tentang riwayat bangsa ini dalam bentuk mitos tentang masa lampainya, seperti kejayaan negara agung Sriwijaya dan Majapahit yang beberapa abad lalu telah mempersatukan seluruh kepulauan nusantara dibawah satu pemerintahan, serta keperkasaan para pahlawannya yang sejak dahulu telah bangkit mengangkat senjata memberi perlawanan terhadap kekuasaan penjajahan asing. Riwayat Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Si Singamangaraja serta berbagai tokoh lain dari masa lampau menjadi kebanggaan bersama sebagai suatu bangsa.

Berbagai perlambang dipilih sebagai perlambang persatuan bangsa, persatuan pelaku-pelaku yang bersal dari berbagai ras, sukubangsa, agama, ideologi politik, dan kewarganegaraan sebagai satu bangsa Indonesia dipermudah dengan dijadikannya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lambat laun tapi semakin cepat berkembang menjadi bahasa tersendiri yang dapat dibedakan dari bahasa

Melayu. Bendera Merah Putih menjadi perlambang dari bangsa Indonesia, dan nyanyian 'Indonesia Raya' menjadi lagu kebangsaan. Nilai-nilai tertentu, seperti Ketuhanan, Persatuan bangsa Indonesia, perikemanusiaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan gotong royong menjadi nilai-nilai bangsa yang dijabarkan dalam semakin banyak aturan sebagai pedoman dan tindakan-tindakan anggotanya, terhadap satu sama lain maupun terhadap orang lain. Para pelaku yang menjalankan peranan dalam kelompok-kelompok yang merupakan perwujudan dari bangsa Indonesia lambat laun mengembangkan jati diri sebagai manusia Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia.

2.2.3. Sukubangsa di Indonesia

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Seroang warga dari suatu kebudayaan hidup dari hari ke hari didalam lingkungan kebudayaannya biasanya tidak lagi melihat corak khas itu. Sebaliknya, terhadap kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya, terutama mengenai unsur-unsur yang berbeda menyolok dengan kebudayaannya sendiri. Corak khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa satu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus; atau karena diantara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus; atau dapat juga karena warganya menganut suatu tema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas tadi juga dapat disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar. Berdasarkan atas corak khusus tadi, suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan yang lain.

Konsep yang tercakup dalam istilah sukubangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dimana kesadaran dan identitas ini biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa; kesatuan kebudayaan ini bukan suatu hal yang ditentukan oleh analisa fihak diluar kebudayaan itu sendiri melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Dengan demikian kebudayaan Bali merupakan suatu kesatuan, yang berbeda dengan kebudayaan Tengger, atau kebudayaan Jawa, atau kebudayaan Lombok, dimana orang-orang Bali sendiri sadar bahwa diantara mereka ada keseragaman pada kebudayaannya, yaitu kebudayaan Bali yang mempunyai kepribadian dan identitas khusus, berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan tetangganya itu. Apalagi adanya bahasa Bali yang berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang lebih memperkuat kesadaran akan

kepribadian khusus tadi. Dalam istilah umum, konsep tentang sukubangsa ini disebut sebagai ‘*ethnic group*’ atau ‘kelompok etnik’.

Dalam kenyataannya, konsep tentang sukubangsa ini tidak sesederhana seperti yang telah terurai di atas, hal ini disebabkan karena batas dari kesatuan manusia yang merasakan diri terikat oleh keseragaman kebudayaan itu dapat meluas atau menyempit, tergantung dari keadaan. Penduduk Papua yang di Papua sendiri sebenarnya merasakan diri sebagai orang Asmat, orang Dani, orang Sentani, orang Kapauku, orang Moni dan sebagainya akan merasa diri mereka sebagai putera Papua apabila mereka keluar dari Papua; kalau orang Papua dari berbagai sukubangsa tadi berada di Jakarta dimana mereka harus hidup berhadapan dengan golongan atau kelompok lain yang lebih besar dalam kekejaman perjuangan hidup di suatu kota besar, mereka akan merasa bersatu sebagai putera Papua, dan tidak sebagai orang Asmat, orang Dani, atau orang Sentani.

Suatu sukubangsa dapat terwujud sebagai suatu persekutuan hidup menjadi lebih luas ataupun persekutuan hidup yang menjadi lebih terbatas; perubahan batas-batas keanggotaan suatu sukubangsa yang menjadi lebih luas terjadi karena perubahan cara pandang berkenaan dengan golongan penduduk tertentu yang semula tidak dianggap anggota sukubangsa yang bersangkutan sebagai orang-orang yang memperlihatkan banyak persamaan dengan kolektiva itu sendiri sehingga akhirnya juga dianggap merupakan bagian dari sukubangsa yang bersangkutan. Perluasan keanggotaan suatu sukubangsa juga bisa terjadi karena keluasan dan pentingnya kesatuan politik yang lebih besar yang pada suatu waktu juga menguasai wilayah sukubangsa yang bersangkutan. Perubahan suatu sukubangsa menjadi lebih terbatas terjadi karena, sebaliknya. Perubahan pandangan sebagian anggota sukubangsa yang bersangkutan terhadap sejumlah anggota lain dari pada mereka. Tentu penciutan suatu sukubangsa bisa terjadi karena pada suatu waktu kekuatan kesatuan politik yang lebih besar membuat batasan pemisah antara dua wilayah sukubangsa yang bersangkutan yang sebelum pemisah ini merupakan satu wilayah dengan penduduk pribumi yang mengacu pada kebudayaan yang sama.

2.2.4. Kebhinekaan Sukubangsa di Indonesia

Harsja Bactiar (1996) menggambarkan bahwa dalam istilah resmi dan untuk sejumlah kepentingan *administratif* praktis, pemerintah Indonesia membagi sukubangsa di Indonesia

menjadi tiga golongan, ialah : (1) sukubangsa; (2) golongan keturunan asing; dan (3) masyarakat terasing. Semua sukubangsa memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia, sedangkan golongan keturunan asing tersebut dalam butir (2) tidak memilikinya karena daerah asal mereka terdapat diluar wilayah Indonesia (Cina, Arab, India, Eropa), atau karena keturunan percampuran (Indo-Eropa), dalam perkembangannya kemudian mereka dihadapkan pada dua alternatif, akan menjadi warga negara Indonesia dengan segala konsekuensinya, atau kembali ke negara asalnya dan tetap dianggap sebagai warga asing; kecuali orang keturunan Eropa, maka sukubangsa seperti keturunan Cina, Arab , dan India kemudian banyak yang menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat terasing dianggap penduduk yang masih hidup dalam taraf kebudayaan sederhana, dan biasanya masih tinggal dalam lingkungan yang terisolasi.

Undang-undang Dasar 1945 mengakui perbedaan sukubangsa yang besar di antara penduduk Indonesia dan menjamin persamaan status bagi semua sukubangsa yang ada di negara ini, tanpa melihat besarnya penduduk masing-masing sukubangsa. Semua sukubangsa mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, membentuk pusat-pusat kebudayaan mereka sendiri, museum, dan lain-lain namun bahasa yang digunakan dalam pendidikan resmi adalah bahasa Indonesia, meskipun selama tiga tahun pertama bahasa daerah masih digunakan di sekolah.

Tidak seperti sukubangsa, penduduk yang termasuk sebagai golongan keturunan asing pada umumnya diharapkan dapat berasimilasi dengan sukubangsa di daerah tempat mereka berada atau sepenuhnya menganut kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nenek moyang mereka hanya untuk dianut dalam kehidupan pribadimereka. Orang Arab Indonesia dengan nyata telah mencapai asimilasi ini, dan mereka hanya dibedakan dari penduduk asli melalui ciri-ciri ras mereka, sedangkan orang India Indonesia dan orang Indo-Eropa sangat kecil dan tak penting jumlahnya, dan mereka terintegrasi atau menganut kebudayaan leluhurnya dalam pergaulan pribadi saja. Sebaliknya, orang keturunan Cina, pada umumnya hidup di daerah perkotaan dan mendominasi sektor ekonomi perkotaan masyarakat kota, sehingga mendudukan mereka pada kategori sosial yang sangat penting dalam masyarakat.

Masyarakat terasing merupakan golongan sukubangsa yang terisolasi yang masih hidup dari berburu, meramu atau berladang padi, keladi dan umbi-umbian dengan cara ladang berpindah, mereka membuka hutan melalui penggunaan teknik peladangan bakar. Biasanya mereka terhambat dari perubahan dan kemajuan karena isolasi geografi mereka, namun

kadang-kadang juga karena upaya-upaya mereka sendiri yang disengaja, untuk menolak bentuk perubahan kebudayaan apapun, seperti halnya orang Baduy di Banten. Banyak warga masyarakat terasing kini mulai mengintegrasikan diri mereka dalam kebudayaan nasional Indonesia, dan kebudayaan tradisional mereka menghilang dengan cepat.

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan beberapa golongan masyarakat terasing yang masih tinggal adalah : (1) orang laut yang bersifat pengembara, sebagaimana yang tercatat dalam karangan-karangan etnografi; (2) Orang Darat, yang hidup tersebar di daerah dataran rendah berawa di Sumatra Timur hingga ke kaki Bukit Barisan di pedalaman; (3) Penduduk kepulauan Mentawai, pulau-pulau di sebelah Sumatra Barat; (4) Orang Baduy di Banten Selatan, Jawa Barat; (5) Orang Donggo, di bagian pedalaman pegunungan Sumbawa Timur; (6) kelompok pengembara orang Punan (atau Penan) yang berpindah-pindah di sepanjang hulu sungai-sungai besar di Kalimantan; (7) Orang Tajio, di Sulawesi Tengah; (8) Orang Amma Toa di Sulawesi Tenggara; (9) Orang Togutil di Halmahera Utara, dan (10) penduduk lembah-lembah pegunungan Tengah di Irian Jaya serta mereka yang hidup di hulu-hulu beberapa buah sungai besar

Kebhinekaan etnolinguistik yang luas dari penduduk Indonesia dimulai sejak masa silam; Hildred Geertz (1983), seorang ahli Antropologi tentang Indonesia, menyatakan bahwa dari sekitar 300 sukubangsa yang ada di Indonesia, sekurangnya ada 250 bahasa daerah yang dipergunakan; Geertz membagi penggunaan bahasa daerah itu menjadi tiga klasifikasi, yaitu (1) kelompok keluarga bahasa *Melayu Polinesia*, yaitu bahasa-bahasa yang digunakan diseluruh kepulauan Indonesia Barat dan Tengah, (2) kelompok keluarga bahasa *Halmahera Utara*, dan (3) kelompok keluarga bahasa-bahasa *Papua*, termasuk didalamnya kelompok Ambon-Timor, Sula-Bacan, dan kelompok Halmahera selatan serta Papua. Pengaruh-pengaruh sejarah kebudayaan yang beraneka-warna yang selama berabad-abad dialami oleh penduduk nusantara ini di berbagai daerah, telah menambah keanekaragaman itu. Daerah-daerah tertentu telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan dari India, Persia, Arab, Cina, dan Eropa Barat, yang menyebabkan perubahan dasar dalam kebudayaan masyarakat yang telah beranekaragam itu, yang terdapat di berbagai daerah di kepulauan nusantara.

Seorang sarjana Belanda C. Van Vollenhoven (1949) membedakan kebudayaan sukubangsa Indonesia berdasarkan sistem lingkaran-lingkaran hukum adat dari masing-masing sukubangsa yang tersebar di Indonesia; Van Vollenhoven membagi lingkaran-lingkaran itu ke dalam 19 daerah hukum adat, yaitu yang meliputi : Aceh, Gayo-Alas dan

Batak (termasuk Nias dan Batu), Minangkabau (termasuk Mentawai), Sumatera Selatan (termasuk Enggano), Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (termasuk Sangir-Talaud) Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon Maluku (termasuk kepulauan Barat Daya), Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Persekutuan hidup lain yang cukup besar adalah umat agama, persekutuan mana terbentuk oleh para penganut agama yang bersangkutan; kepercayaan-kepercayaan yang didasarkan ataskitab tertentu yang dianggap suci dan kegiatan-kegiatan ibadah yang diselenggarakan menurut aturan-aturan tertentu. Oleh sebab itu, pedoman-pedoman yang dianggap berlaku oleh para anggota penganut suatu agama adalah ajaran yang bersangkutan serta nilai-nilai dan aturan-aturan hukum agama yang terkait pada ajaran-ajaran ini.

Di wilayah negara Republik Indonesia terdapat paling sedikit 7 umat agama yang besar, yaitu umat Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Sikh, Tridharma menurut ajaran Lao-tse dan Konghutju. Para anggota umat suatu agama tidak hanya mencakup sekalian warga masyarakat Indonesia, warga bangsa Indonesia, ataupun sekalian warga negara Republik Indonesia. Akan tetapi masing-masing umat agama, tanpa kecuali, juga beranggotakan sejumlah orang asing yang menganut agama yang sama. Bahkan sesungguhnya umat agama di Indonesia merupakan bagian dari umat yang jauh lebih besar dan tersebar juga di luar Indonesia. Pusat kegiatan ibadah umat agama Islam berada di negeri Arab, Mekkah dan Medinah. Berbagai jemaah agama Kristen Protestan merupakan bagian dari jemaah agama yang berpusat di negeri Belanda, Jerman, Amerika Serikat, atau negeri lain. Umat agama Katolik merupakan bagian dari umat besar yang dipimpin oleh hierarki agama yang berpusat di Vatikan. Umat agama Hindu, Budha, dan Sikh mengacu pada kitab-kitab suci yang berasal dari India. Agama Tridharma menurut ajaran Lao-tse dan Konghutju mengacu pada tradisi budaya di Cina.

2.2.5. Kebudayaan Nasional :

Pengembangan suatu kebudayaan nasional masa kini yang mempengaruhi cara hidup masyarakat, terutama di bidang ekonomi, lapangan pekerjaan dan bidang sosial politik, terutama di Jakarta, berlangsung secara nyata. Dalam proses ini, penggunaan bahasa Indonesia, yang ketika itu sudah diterima oleh sebagian besar warga negara, telah

mengintegrasikan hubungan-hubungan sosial politik orang Indonesia, lepas dari perbedayaan latar belakang budaya mereka. Dengan demikian bahasa Indonesia merupakan unsur yang paling sentral dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa di Jakarta yang memonitor kebijakan bahasa nasional, yang merencanakan dan menerapkan penelitian serta pengembangan terhadap bahasa nasional maupun bahasa-bahasa daerah, termasuk hubungan antara bahasa-bahasa itu, merupakan lembaga penting dalam pengembangan kebudayaan nasional Indonesia.

Generasi bangsa Indonesia yang lahir sesudah kemerdekaan, yang sepenuhnya menerima pendidikan nasional Indonesia, menerima kebudayaan nasional Indonesia melalui bahasa Indonesia dan melalui cara-cara hidup masa kini serta pertunjukan seni (termasuk film) dalam bahasa Indonesia. Bahasa nasional juga dari seni gaya telah berintergrasi dengan sangat efektif ke dalam kebudayaan-kebudayaan sukubangsa diantara generasi muda , dan walaupun mereka mungkin belum menghargai kesusasteraan tradisional sukubangsa orangtua mereka, pada umumnya mereka telah diajar untuk menghargainya sebagai warisan kebudayaan mereka.

Masalah kebhinekaan sukubangsa dan kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu negara berkembang besar yang multietnik memerlukan satu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan perasaan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya.

3. Bentuk-Bentuk Kelompok

Bentuk-bentuk kelompok yang dibahas disini meliputi bentuk-bentuk umum dengan ciri-ciri kesetaraan seperti agama, ras, budaya, dan gender. Berbeda dengan prinsip-prinsip hirarkis (jenjang atau lapisan sosial), maka bentuk pengelompokkan ini lebih didasarkan pada perbedaan ciri atau dalam istilah sosial lebih dikenal dengan diferensiasi.

Dalam pengertian umum, defenrensiasi dapat diartikan sebagai perbedaan antara satu substansi dengan substansi yang lain; berbeda dengan pengertian stratifikasi yang lebih menunjukkan perbedaan tingkatan (hirarki) dimana satu tingkat lebih tinggi atau rendah dari tingkat lainnya, maka deferensiasi lebih menunjukkan kepada perbedaan menurut sifatnya (horisontal). Kelompok mahasiswa semester 8 dengan kelompok mahasiswa semester 2 Fakultas Sastra Universitas Indonesia adalah perbedaan menurut kajian stratifikasi, namun

kelompok mahasiswa Jurusan sastra Indonesia, Jurusan Sastra Jepang, Jurusan Sastra Inggris dan Jurusan Sastra lainnya pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia adalah perbedaan menurut kajian deferensiasi. Pengusaha pabrik sepatu dengan karyawannya adalah kajian sistem stratifikasi, namun kelompok karyawan perusahaan sepatu Adidas dengan kelompok karyawan sepatu Nike dan kelompok karyawan sepatu Cibaduyut Bandung adalah kajian menurut deferensiasi. Perbedaan pada dua keadaan ini sebenarnya terletak pada seperangkat hak dan kewajiban, satu bentuk menekankan pada besar-kecilnya beban hak dan kewajiban yang harus dipikul, sedangkan satu bentuk lagi menekankan pada distribusi (sifat) hak dan kewajiban itu.

3.1. Deferensiasi Agama

Agama adalah suatu bentuk pemujaan dan peribadatan menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang pada Zat yang dianggap layak untuk dipuja, disembah, atau diibadati; Zat mana sifatnya transendental – *supra natura*. Tujuan dari adanya agama ini jelas, yaitu untuk menuntun manusia hidup sebagaimana layaknya manusia; Aritoteles menyebutkan bahwa satu ciri dari manusia itu adalah mahluk yang *membelum*, mereka senantiasa merasa tidak puas dengan apa yang ada, sering terjadi bahwa untuk memenuhi dorongan ketidakpuasannya itu mereka tidak lagi menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan', *homo homini lupus*.

Agama itu sifatnya universal, dalam arti berlaku untuk orang banyak, tidak ada satu agamapun di dunia ini yang sifat kepentingannya parsial (satu kelompok) apalagi individual. Orang perorangan bebas untuk menentukan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, keyakinan mana bisa dipengaruhi oleh siapa saja di luar dirinya, namun yang lebih berkualitas adalah keyakinan atas dasar kesadaran sendiri melalui pengamatan, pembelajaran, pendalaman, penghayatan dan pemahaman tentang agama yang dihadapi; kebenaran akhirnya timbul menurut diri sendiri atas dasar keyakinan menurut tuntunan agama, sedangkan kebenaran yang disampaikan orang lain hanya sebatas media atau salah satu masukan yang dapat memperkaya analisa mencapai kebenaran itu. Kebenaran tanpa tuntunan agama akhirnya dapat menyesatkan keyakinan manusia, kebenaran itu harus mempunyai dasar pijakan; bila tanpa didasari atas pijakan agama, dapat dibayangkan kalau misalnya jumlah seluruh penduduk bumi ini ada 1 miliar orang, maka kemungkinan yang timbul adalah sebanyak 1 miliar kebenaran !.

Potensi, kapasitas, emosi, pengalaman dan akal manusia itu tidak sama, tidak mengherankan bila dalam menentukan keyakinannya atas berpuluh-puluh bahkan mungkin beribu-ribu agama di dunia ini kemudian timbul kelompok-kelompok keagamaan. Bila kita mengacu pada proses timbulnya keyakinan untuk mencapai suatu kebenaran seperti diatas, keadaan ini sebenarnya tidak perlu dirisaukan; kita mempunyai prinsip tentang kebenaran, perkara ternyata orang lain mempunyai prinsip kebenaran yang berlainan mengapa seperti orang yang *'kebakaran jenggot'* ? toh, dalam setiap agama manapun ada sistem pengaturan tentang hidup bersama, antar sesama umat juga antar umat yang berbeda, suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan, orang tua dengan anak, anak dengan anak , dan banyak lagi hubungan antar manusia.

Yang biasanya menjadi masalah adalah satu fihak merasa lebih benar dari fihak lainnya melalui praktek-praktek pemaksaan atau kekuasaan sehingga akhirnya timbul pertentangan, baik menyangkut lingkup individual maupun kelompok. Pada bentuk yang lain berkaitan dengan agama ini bahwa tidak jarang ada kelompok-kelompok keagamaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran menurut agama yang diyakininya, kebenaran yang ada disini sifatnya sefihak yaitu yang menurut kelompok tersebut benar bukan menurut agamanya.

Masalah lainnya yang biasa terjadi adalah banyak orang yang dianggap sebagai pemimpin masyarakat yang mempunyai prinsip-prinsip kebenaran dan sering berbicara tentang prinsip kebenaran itu tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan atau bicarakan; bagaimana pengaruhnya terhadap orang banyak sedangkan pemimpinnya tidak menunjukkan bahwa mereka pantas untuk dijadikan sebagai figur pemimpin masyarakat ? bagaimana jadinya bila seorang koruptor berbicara tentang ketidak-benaran praktek KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) ?

3.2. Deferensiasi ras

Konsep tentang ras sudah cukup jelas, yaitu sebagai ciri-ciri fisik tertentu yang sama yang melekat pada diri manusia. Sampai saat ini dan kita yakini sampai saat kapanpun agaknya perbedaan ciri fisik ini tidak akan bisa dijadikan dasar ukuran untuk menentukan kualitas manusia itu sendiri; masalah tentang adanya peradaban yang tinggi pada satu

masyarakat dibandingkan masyarakat yang lain sebenarnya menyangkut bagaimana tingkat interaksi sosial masyarakat tersebut dengan masyarakat lain, semakin tinggi hubungan mereka dengan masyarakat yang lain maka akan semakin kuat kecenderungan mereka akan perubahan, selain dari tingkat toleransi nilai-nilai budaya setempat terhadap suatu perubahan, yang jelas tinggi-rendah peradaban manusia itu bukan atas dasar rasial.

Penjelasan tentang hubungan ras dengan kualitas hidup manusia ini telah kita pelajari pada bagian sebelumnya, sehingga kita menjadi lebih faham bahwa perbedaan ras itu bukan tentang hal tinggi atau rendah namun perbedaan yang sifatnya horisontal. Walaupun secara teoritis sebenarnya mudah untuk menentukan hubungan ras dengan bentuk perbedaan dalam masyarakat namun dalam kenyataannya ada saja fakta yang menggambarkan hubungan ras dengan pelapisan (kelas-kelas) sosial; kalau kita menyimak pelajaran terdahulu sebenarnya bukan hanya masalah ciri fisik yang menjadi dasar pembedaan tetapi tentang hal-hal kesejarahan, mayoritas-minoritas, dan yang lebih berkecenderungan adalah hal kekuasaan dan ekonomi.

3.3. Deferensiasi budaya

Budaya merupakan suatu kesamaan kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam dimensi kelompok, bentuk majemuknya adalah kebudayaan; kelompok manusia yang memiliki kebudayaan disebut sebagai masyarakat dan komunitas; selain itu, tidak ada pengelompokan manusia apapun yang memiliki kebudayaan. Misalnya kegiatan yang berkenaan dengan sistem bahasa (komunikasi), yang menjadi ciri masyarakat dalam aktifitas berbahasa adalah sistem komunikasi yang biasa dipakai dan sekaligus menjadi ciri khas bahasa dalam masyarakat, itulah sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Aktifitas manusia disini dapat berarti luas yaitu yang menyangkut pemikiran, wawasan, norma-norma atau nilai-nilai juga menyangkut hubungan manusia satu dengan manusia lain, atau seperangkat hasil karya manusia. Kalau dikatakan bahwa segenap aktifitas manusia dalam dimensi masyarakat itu disebut kebudayaan, maka tentu gagasan-gagasan, aturan, nilai tentang segenap aktifitas tersebut timbul atas kesadaran mereka tentang nilai dan kepentingannya menurut masyarakat tersebut.

Dengan perbedaan nilai dan kepentingan ini tidak mengherankan bila tiap-tiap masyarakat dan kebudayaan mempunyai perbedaan dalam berbagai bentuk kegiatan, walaupun substansi kegiatan itu sama; seperti kegiatan berbahasa seperti di atas, mereka sama mempunyai bahasa, tetapi simbol-simbol verbal sebagai ciri kebahasaan dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain mungkin akan berbeda-beda.

Perbedaan kebudayaan ini tidak menunjukkan sistem pelapisan, atau hierarki tetapi lebih menunjukkan perbedaan kesetaraan; di dunia ini tidak ada satu atau beberapa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan lainnya.

3.4. Deferensiasi Gender

Setiap orang pasti mempunyai kedudukan dalam masyarakat, terlepas apakah kedudukannya didapat melalui mekanisme penurunan, pemberian atau pencapaian. Perbedaan gender (jenis kelamin) tentunya melalui mekanisme penurunan, yaitu melalui proses kelahiran, tidak ada seorangpun yang mempunyai kemampuan untuk memilih apakah kelahirannya akan menjadi laki-laki atau perempuan. Dengan perbedaan gender ini kemudian masyarakat menentukan aktifitas apa yang pantas atau bisa diterapkan pada masing-masing pembawaan, mereka menerapkan seperangkat hak dan kewajiban padanya; biasanya dalam masyarakat ada suatu pembagian tugas sesuai dengan sifat, kemampuan fisik, atau pembawaan alamiah lainnya, mana yang menjadi tugas pokok laki-laki dan mana yang menjadi tugas pokok perempuan.

Struktur anatomi laki-laki terbentuk sedemikian rupa sehingga secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan; dan pada masyarakat yang relatif sederhana, kelebihan kemampuan inilah yang dijadikan sebagai salah satu ukuran dominasi gender. Laki-laki menganggap diri sebagai yang terkuat dan perempuan dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah, sehingga hampir dalam berbagai bidang kehidupan sering dijadikan sebagai bahan eksploitasi, tidak jarang hak-hak mereka sebagai manusia yang sama banyak yang diabaikan.

Kalau pernah belajar sejarah tentang sebab turunnya agama Islam di negeri Arab pada abad ke – 5 , tentu akan lebih faham sehubungan dengan perbedaan gender ini; pada saat itu yang disebut sebagai jaman *jahiliyah* (jaman kebodohan), sebuah keluarga akan sangat malu bila mempunyai anak perempuan ! seorang anak perempuan kalau tidak

dianggap anak, baik-baiknya dia di buang, buruknya di jual dan yang paling tidak manusiawi adalah dengan menghentikan hidupnya!! Tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang Arab pada saat itu sehingga hampir tidak ada nilai dari perempuan, padahal dia harus menyadari bahwa keberadaannya dunia, sebagai apapun dia, adalah dari peranan perempuan. Dengan turunnya agama Islam di Negeri Arab, lambat laun pemikiran itu berubah, keberadaan perempuan sedikit demi sedikit menjadi lebih berarti, sampai pada derajat kesamaan; hak perempuan sama dengan laki-laki, hanya kewajibannya saja yang berbeda satu sama lain.

Pada bentuk masyarakat yang lebih modern seperti sekarang ini, walaupun kecenderungan pembedaan gender ini masih ada, namun dengan pemikiran yang lebih maju pula, rupanya tidak ada alasan sama sekali untuk membedakan kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban walaupun dalam bentuk yang berbeda, namun juga masing-masing mempunyai hak serta fasilitas yang sama sesuai dengan kemampuannya.

Bahan Rujukan

- Bachtiar, Harsya W. (1996). *Masyarakat, Bangsa, Negara dan Umat di Indonesia (Teori Sosiologi dan Kenyataan Sosial)*. Jurnal Sosiologi Indonesia. (1996). No. 1/Juli/1996, Jakarta: Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Djojodigpeno, M.M. (1958). *Azas-azas Sosiologi*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Frederick,W.H-Soeroto,S. ed. (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi*; Jakarta: LP3ES.
- Furnivall, J.S., (1967), *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press.
- , (1956), *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, New York University Press.

- Geertz, Clifford. (1982). *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (terj.), diterbitkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Pustaka Jaya Jakarta.
- Geertz, Hildred. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (terj.), Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FS UI.
- Grusky, David B.ed. (1994). *Social Strtification, Class, Race and Gender*; Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press.
- Horton, Paul B.- Hunt, Chester L. (1992). *Sosiologi*, (terj.). edisi keenam, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Koentjaraningrat. (1993). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Lawang, Robert. (1985). *Sistem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Kurunika Universitas Terbuka.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sanderson, (2000) *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (1979). *Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Sturktur Sosial*, Jakarta: CV Rajawali
- Soemardjan, Selo-Soemardi, (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi*, Penerbitan : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.